

ABSTRAK

Keberhasilan menjerat pelaku tindak pidana kepabeanan akan sangat bergantung pada proses penegakan hukum pidana. Salah satu proses yang menunjang dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepabeanan adalah proses penyidikan. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan peran utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara umum. Akan tetapi KUHAP masih memberikan kewenangan kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu untuk melakukan penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Masalah yang dibahas dalam penulisan tesis ini, yaitu 1) Bagaimanakah *legal standing* Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyidikan tindak pidana kepabeanan? dan 2) Bagaimanakah upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia menguatkan *legal standing* dalam penyidikan tindak pidana kepabeanan di masa depan? Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian empiris, dengan sifat penelitian deskriptif analitis, dengan metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), serta pengolahan data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *legal standing* Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyidikan tindak pidana kepabeanan didasarkan kepada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia menguatkan *legal standing* dalam penyidikan tindak pidana kepabeanan di masa depan dengan cara mengajukan *judicial review* terhadap Undang-Undang Kepabeanan menyangkut *legal standing* dalam penyidikan tindak pidana kepabeanan. Adapun saran yang dapat diberikan, yaitu 1) Diharapkan adanya pengaturan yang jelas dan rinci mengenai wewenang Polri dan prosedur bidang penyidikan tindak pidana kepabeanan melalui revisi Undang-Undang Kepabeanan, dan 2) Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana kepabeanan, diperlukan peningkatan koordinasi dan pengawasan antar institusi yang terkait dalam penegakan hukum, serta sosialisasi peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : *Legal Standing*, Penyidik, Penyidikan, Tindak Pidana Kepabeanan

ABSTRACT

The success of ensnaring perpetrators of customs crimes will depend on the criminal law enforcement process. One of the supporting processes in law enforcement against perpetrators of customs crime is the investigation process. The Criminal Procedure Code (KUHAP) gives the Indonesian National Police the main role in carrying out the task of investigating and investigating criminal offenses in general. However, the Criminal Procedure Code still gives authority to certain Civil Servants (PPNS) to carry out investigations in accordance with the special authority granted by the law on which each legal basis is based. The issues discussed in the writing of this thesis are: 1) What is the legal standing of the Republic of Indonesia State Police Investigator in investigating customs crimes? and 2) How are the efforts of the National Police of the Republic of Indonesia to strengthen the legal standing in the investigation of customs crimes in the future? This type of research in writing this thesis is normative legal research supported by empirical research, with the nature of descriptive analytical research, with methods of collecting data through library research and field research, and qualitative data processing. The results of this study indicate that the legal standing of the Indonesian National Police Investigator in investigating customs criminal acts is based on the provisions of Article 1 number 1 of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, Article 14 paragraph (1) letter (g) Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, and Article 1 paragraph (2) of Government Regulation Number 55 of 1996 concerning Criminal Investigation in the Field of Customs and Excise. The efforts of the National Police of the Republic of Indonesia to strengthen the legal standing in investigating customs crimes in the future by submitting a judicial review of the Customs Law concerning legal standing in investigating customs criminal acts. As for suggestions that can be given, namely 1) It is expected that there are clear and detailed arrangements regarding the authority of the National Police and procedures in the field of investigation of customs crimes through the revision of the Customs Law, and 2) To avoid overlapping authority in investigating customs criminal acts, it is necessary to increase coordination and supervision between institutions involved in law enforcement, as well as socialization of legislation.

Keywords: *Legal Standing, Investigators, Investigations, Customs Crimes*